

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERWARALABA DALAM HAL
PEWARALABA MELAKUKAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN
WARALABA
(STUDI KASUS PERJANJIAN WARALABA SUPERWASH)

Oleh :

Pebryella Shinta Nainggolan¹ dan Antari Innaka²

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan perjanjian waralaba antara pewaralaba dan terwaralaba serta perlindungan hukum bagi terwaralaba yang dirugikan oleh pewaralaba yang telah melakukan tindakan wanprestasi dalam perjanjian waralaba Superwash.

Jenis penelitian menggunakan normatif empiris yang didukung dengan datasekunder yang bersumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan metode dokumentasi dan alat pengumpulan data berupa studi dokumen. Data primer diperoleh langsung dari narasumber dilapangan melalui wawancara dengan alat pengumpulan data berupa pedoman wawancara. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian pelaksanaan perjanjian antara pewaralaba dan terwaralaba tidak berjalan dengan baik, dikarenakan pihak pewaralaba tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan perjanjian. Proses wanprestasi terjadi saat paca koontrak akibatnya terwaralaba mengalami kerugian dan tidak bisa menjalankan usahanya dengan lancar. Perlindungan hukum yang dapat diberikan adalah perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Dalam perlindungan preventif disini baik pihak pewaralaba maupun terwaralaba harus mengindahkan itikad baik pra kontrak dan peraturan undang-undang yang berlaku. Perlindungan represi disini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yaitu, Terwaralaba dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan dengan mendalilkan bahwa sebenarnya perjanjian itu tidak ia kehendaki atau bahwa perjanjian itu tidak ia kehendaki dalam bentuknya yang demikian berdasarkan Pasal 1449 KUHPerdara.

Kata kunci : waralaba, wanprestasi perjanjian, perlindungan hukum.

¹ Mahasiswa Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

² Dosen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

LEGAL PROTECTION OF FRANCHISEE IN A NOTARIAL THAT A FRANCHISOR BREACHES A FRANCHISE AGREEMENT

By:

Pebryella Shinta Nainggolan³ dan Antari Innaka⁴

ABSTRACT

This study aims to assess the implementation of franchise agreements between franchisee and franchisee as well as legal protection for franchisee harmed by franchisees who have committed an act of default in Superwash franchise agreement.

Types of empirical normative research are supported by secondary data derived from primary, secondary, and tertiary legal materials. Secondary data obtained from library research with documentation method and data collection tool in the form of document study. Primary data obtained directly from resource persons in the field through interviews with data collection tools in the form of interview guidelines. The data obtained are then analyzed qualitatively.

The results of the implementation of the agreement between the franchisee and the franchisee do not work well, because the franchisee does not perform its obligations in accordance with the agreement. The process of wanprestasi occurs when paca koontrak consequently terwaralaba experience losses and can not run business smoothly. Legal protection that can be given is protection of preventive law and repressive law protection. In preventive protection here both the franchisee and the franchise must heed the good faith of the contract and the applicable law. The protection of repression here aims to resolve the dispute that, the Terwaralaba may file a lawsuit by arguing that in fact the treaty is unlawful or that the treaty is not desirable in such form under Article 1449 of the Civil Code.

Keywords: franchise, wanprestasi agreement, legal protection.

³ Mahasiswa Magister Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

⁴ Dosen Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.